



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.09.2.408828/2020**



DS:4347-7761-8003-1816

Revisi ke 01

Tanggal : 20 Februari 2020

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
 3. Provinsi : (12) LAMPUNG
 4. Kode>Nama Satker : (408828) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
- Sebesar : Rp. 226.573.000 (DUA RATUS DUA PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.09.11 Program Pemajuan HAM
013.09.11.5255 Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 226.573.000
Rp. 226.573.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 226.573.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDAR LAMPUNG (017) Rp. 226.573.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408828/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:4347-7761-8003-1816

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (408828) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

Kuasa Pengguna Anggaran : NOFLI
Bendahara Pengeluaran : ARYA DWIJAYANTI
Pejabat Penanda Tangan SPM : IDA ASEP SOMARA

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			226.573.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			226.573.000
2 Program	013.09.11	Program Pemajuan HAM			226.573.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	70	Persen	
	02	Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	15	Persen	
	03	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	10	Persen	
	04	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	Persen	
	05	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	75	Persen	
	06	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	1	Rekomendasi	
	07	Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang di tindaklanjuti	60	Persen	
Output Program	01	kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM			
Indikator Output Program	01	Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	70	Persen	
	02	Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	15	Persen	
	03	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	10	Persen	
	04	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	Persen	
	05	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	75	Persen	
	06	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	1	Rekomendasi	
	07	Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang di tindaklanjuti	60	Persen	
Kegiatan	5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah			226.573.000
Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
	02	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
	02	jumlah kab/kota peduli HAM			
	03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM			
	01	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408828/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:4347-7761-8003-1816

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (408828) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

Kuasa Pengguna Anggaran : NOFLI
Bendahara Pengeluaran : ARYA DWIJAYANTI
Pejabat Penanda Tangan SPM : IDA ASEP SOMARA

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		
	02	jumlah kab/kota peduli HAM		
	03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		
	01	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		
	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		
	02	jumlah kab/kota peduli HAM		
	03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		
	01	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		
Output Kegiatan	5255.001	Pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 rekomendasi	89.463.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM	99 rekomendasi	
Output Kegiatan	5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	6 Instansi Pemerintah	137.110.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan aksi HAM	1 Pemerintah Daerah	
	02	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota	

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.09.2.408828/2020

I B. SUMBER DANA



DS:4347-7761-8003-1816

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
 Provinsi : (12) LAMPUNG
 Kode>Nama Satker : (408828) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	226.573.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	226.573.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408828/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4347-7761-8003-1816

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (408828) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408828	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	-	226.573	-	-	-	226.573		
013.09.11	Program Pemajuan HAM	-	226.573	-	-	-	226.573		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	226.573	-	-	-	226.573		
5255.001	Pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	89.463	-	-	-	89.463	12.51	
01	RM	-	89.463	-	-	-	89.463	017	
5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	137.110	-	-	-	137.110	12.51	
01	RM	-	137.110	-	-	-	137.110	017	
JUMLAH		-	226.573	-	-	-	226.573		

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408828/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4347-7761-8003-1816

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (408828) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

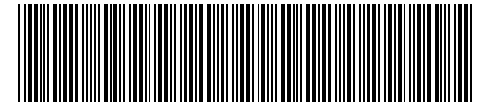
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408828	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	19.750	42.530	22.730	7.350	32.780	12.343	37.970	19.770	11.050	9.520	10.780	226.573
		52 BELANJA BARANG	0	19.750	42.530	22.730	7.350	32.780	12.343	37.970	19.770	11.050	9.520	10.780	226.573
	013.09.11.5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	0	19.750	42.530	22.730	7.350	32.780	12.343	37.970	19.770	11.050	9.520	10.780	226.573
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	19.750	42.530	22.730	7.350	32.780	12.343	37.970	19.770	11.050	9.520	10.780	226.573

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408828/2020
IV A. B L O K I R**



DS:4347-7761-8003-1816

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [408828] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

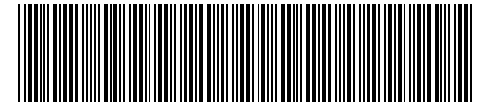
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408828/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:4347-7761-8003-1816

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [408828] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001